



BUPATI BANGLI  
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BANGLI  
NOMOR 700/8/2024

TENTANG

PENETAPAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS  
RISIKO INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah merupakan salah satu unsur manajemen Pemerintahan yang penting untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, efektif, efisien, terarah dan terkoordinasi;
- b. Bahwa agar pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat berjalan dengan baik berdaya guna dan berhasil guna perlu disusun Program Kerja Tahunan Berbasis risiko;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahunan merupakan salah satu perencanaan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis risiko Inspektorat Daerah Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1218);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor157);

8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2023 Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2023 Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Daerah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Program Kerja Pengawasan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Bangli.
- KETIGA : Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dilaporkan kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Pertanggungjawaban penggunaan dana/biaya sebagaimana dimaksud diktum KEEMPAT dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangli  
pada tanggal 2 Januari 2024

BUPATI BANGLI,



SANG NYOMAN SEDANA ARTA

Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Bangli.
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kabupaten Bangli.
3. Kepala Badan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bangli.
4. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bangli.
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bangli.
6. Arsip.

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI BANGLI  
NOMOR 700/8/2024  
TENTANG  
PENETAPAN PROGRAM KERJA  
PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS  
RISIKO INSPEKTORAT DAERAH  
TAHUN 2024

I. PENDAHULUAN

Inspektorat Daerah Kabupaten Bangli adalah lembaga teknis dalam lingkup Pemerintahan Kabupaten Bangli yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 dengan tugas melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Inspektorat Daerah Kabupaten Bangli mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan dan pengawasan untuk tujuan tertentu;
- c. pelaksanaan urusan administrasi lingkup Inspektorat; dan
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan.

Berkenaan dengan tugas Inspektorat Daerah Kabupaten Bangli yaitu perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan, maka disusun Usulan Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2024, guna menjadi pedoman/panduan dalam pelaksanaan tugas pengawasan selama 1 (satu) tahun.

II. TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT KABUPATEN BANGLI

Sesuai Peraturan Bupati Bangli Nomor 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat, maka tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Bangli dijabarkan sebagai berikut :

- a. Inspektur
- b. Sekretaris
- c. Sub Bagian Umum dan Keuangan
- d. Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III, IV; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional

III. RUANG LINGKUP PENGAWASAN

Ruang lingkup pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bangli tahun 2024, mencakup :

- a. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang meliputi Administrasi Umum Pemerintahan dan Urusan Pemerintahan;
- b. Audit dengan tujuan tertentu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Bangli;

- c. Audit Kinerja atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Bangli, yang mencakup audit kinerja atas pengelolaan keuangan daerah (seperti audit kinerja atas penyusunan dan pelaksanaan anggaran, audit kinerja atas penerimaan, penyaluran dan penggunaan dana, audit kinerja atas pengelolaan asset dan kewajiban) dan audit kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Bangli (seperti audit kinerja atas fungsi kepariwisataan, audit kinerja atas fungsi kebudayaan dan audit kinerja atas fungsi lainnya);
- d. Reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Bangli, seperti reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Reviu atas Rencana Kerja dan Anggaran Pemerintah Kabupaten Bangli dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bangli;
- e. Evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Bangli seperti Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- f. Pemantauan dan aktivitas pembinaan dan pengawasan lainnya yang berupa asistensi, sosialisasi dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kabupaten Bangli;
- g. Penguatan Aparat Pengawas Intern Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli;
- h. Pengawasan atas pengelolaan anggaran pendidikan;
- i. Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- j. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;
- k. Pemantauan Perkembangan Indikator Kinerja; dan
- l. Tugas lain selain kebijakan Bupati antara lain mengenai hal-hal yang dianggap strategis dilingkup Daerah.

#### IV. SASARAN PENGAWASAN

Pelaksanaan tugas pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Bangli tetap mengacu pada kebijaksanaan Pengawasan Nasional yang berlaku di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dengan tetap mempertimbangkan kondisi obyektif yang ada, meliputi :

- a. Tuntutan kebutuhan masyarakat akan peranan Aparat Pengawasan Intern di Daerah;
- b. Kualitas dan kuantitas/kemampuan Operasional Aparat Pengawasan atau Sumber Daya Manusia (SDM);
- c. Dukungan dana penunjang dari Pemerintah Kabupaten Bangli;
- d. Dukungan sarana dan prasarana yang memadai;
- e. Pengawasan, Penggunaan dana desa melalui Siskiudes dan Siwaskiudes; dan
- f. Dukungan Bupati dalam sasaran pemeriksaan pengawasan dan hasil-hasil pengawasan.

Merujuk dari pertimbangan tersebut, maka ditetapkan sasaran pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2024, sebagai berikut :

- a. Meningkatnya ketaatan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Bangli;
- b. Meningkatnya efektivitas manajemen risiko dalam

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Bangli;

- c. Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Bangli yang bersih dan bebas dari praktik-praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

#### V. OBJEK PEMERIKSAAN

Objek pemeriksaan Inspektorat Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2024 adalah objek pemeriksaan yang memiliki risiko tinggi, sedangkan objek pemeriksaan yang memiliki risiko rendah akan diaudit setiap 2 atau 3 tahun sekali.

Adapun rincian objek pengawasan untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Sekretariat Daerah/Bagian : 9 ( Sembilan )
- b. Sekretariat DPRD : 1 ( Satu )
- c. Dinas/Badan : 26 ( Dua puluh enam )
- d. RSUD, BLUD : 1 ( Satu )
- e. Kecamatan : 4 ( Empat )
- f. KPU, BAWASLU, KONI : 3 ( Tiga )
- g. Desa : 69 ( Enam puluh delapan )

#### VI. PERSONIL DAN PENUNJANG

##### a. Personil

Adapun jumlah pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Bangli yang melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan serta tugas kesekretariatan adalah sebagai berikut :

1. Inspektur : 1 orang
2. Sekretaris : 1 orang
3. Inspektur Pembantu Wilayah : 4 orang
4. Kepala Sub. Bagian : 1 orang
5. Auditor : 15 orang
6. P2UPD : 27 orang
7. Staf Administrasi : 22 orang

##### b. Jumlah Anggaran

Jumlah Anggaran operasional Inspektorat Daerah Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 10.583.347.000,00 (sepuluh milyar lima ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

#### VII. LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN YANG DITERBITKAN

Laporan Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut yang diterbitkan direncanakan sebanyak 181 laporan terdiri dari :

1. Asistensi dan Penilaian Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Nawa Adyasta) sebanyak 37 laporan;
2. Monitoring LHKASN sebanyak 1 laporan;
3. Reviu DAU yang ditentukan penggunaannya TA 2024 dan Reviu Sisa DAU yang ditentukan penggunaannya TA 2023 sebanyak 2 laporan;
4. Evaluasi Risk Register OPD sebanyak 1 laporan;

5. Reviu DAK Fisik sebanyak 12 laporan;
6. Pengawasan dan Monitoring SP4LAPOR sebanyak 12 laporan;
7. Monitoring dan TindakLanjut WBS Kabupaten sebanyak 2 laporan;
8. Monitoring dan Tindak Lanjut Pemeriksaan Internal sebanyak 2 laporan;
9. Monitoring dan Tindak Lanjut Pemeriksaan Eksternal sebanyak 2 laporan;
10. Monitoring dan TindakLanjut WBS PBJ sebanyak 2 laporan;
11. Penilaian Mandiri MPAK (FCP) sebanyak 2 laporan;
12. Audit Investigasi/PKKN (Perhitungan Kerugian Keuangan Negara) sebanyak 3 laporan;
13. Monitoring dan Evaluasi SPI sebanyak 1 laporan;
14. Probity Audit sebanyak 5 laporan;
15. Reviu LPPD sebanyak 1 laporan;
16. Reviu BOS SD dan Reviu BOS SMP sebanyak 2 laporan;
17. Audit Pengelolaan Keuangan Desa sebanyak 7 laporan;
18. Reviu LKPD sebanyak 1 laporan;
19. Reviu LKjIP sebanyak 1 laporan;
20. Reviu SSH, ASB dan HSPK 2025 sebanyak 2 laporan;
21. Reviu Sisa DAK Fisik TA 2023 dan Reviu Sisa DAK Nonfisik TA 2023 sebanyak 2 laporan;
22. Monitoring dan Evaluasi Kapabilitas APIP sebanyak 2 laporan;
23. Reviu Penyerapan Anggaran,PBJ dan Penggunaan Dana Desa sebanyak 4 laporan;
24. Reviu Manajemen ASN sebanyak 1 laporan;
25. Audit Ketaatan sebanyak 3 laporan;
26. Pengawasan P3DN sebanyak 4 laporan;
27. Evaluasi LKjIP sebanyak 37 laporan;
28. Reviu Kode Etik sebanyak 1 laporan;
29. Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik sebanyak 1 laporan;
30. Reviu Rancangan KUA/PPAS Induk 2025 sebanyak 1 laporan;
31. Reviu RKPD Induk 2025 sebanyak 1 laporan;
32. Reviu RPJPD sebanyak 1 laporan;
33. Audit Kinerja sebanyak 2 laporan;
34. Monitoring dan Evaluasi PMPRB sebanyak 1 laporan;
35. Reviu Tata Kelola PBJ sebanyak 1 laporan;
36. Pembinaan ZI sebanyak 2 laporan;
37. Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP sebanyak 1 laporan;
38. Penilaian Mandiri Maturitas SPIP sebanyak 1 laporan;
39. Monev Saber Pungli sebanyak 2 laporan;
40. Reviu Benturan Kepentingan sebanyak 1 laporan;
41. Reviu RKPD Perubahan 2024 sebanyak 1 laporan;
42. Reviu KUA/PPAS Perubahan 2024 sebanyak 1 laporan;
43. Reviu Rancangan Akhir Renja 2025 sebanyak 1 laporan;
44. Evaluasi capaian MCP Korsupgah sebanyak 2 laporan;
45. Reviu Renja OPD sebanyak 1 laporan;
46. Reviu RKA Induk 2025 sebanyak 1 laporan;
47. Monitoring dan Evaluasi Kapabilitas APIP sebanyak 1 laporan;
48. Reviu RKA Perubahan 2024 sebanyak 1 laporan;
49. Reviu Tata Kelola Pajak Daerah sebanyak 1 laporan;
50. Pemeriksaan Serentak Cash opname sebanyak 3 laporan
51. Pengawasan BOK PM sebanyak 1 laporan.



## I. PENUTUP

Demikian Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2024 ini disusun untuk menjadi pedoman/panduan dalam pelaksanaan tugas-tugas pengawasan di Kabupaten Bangli.

BUPATI BANGLI,  
  
SANG NYOMAN SEDANA ARTA

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI BANGLI

NOMOR : 700/8/2024

TANGGAL : 2 Januari 2024

TENTANG : PENETAPAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RESIKO  
INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2024

No	Irbn Pengampu	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		Jumlah (Orang)						Jumlah HP perorangan						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan	Irbn 1	Irbn 2	Irbn 3	Irbn 4								
						RMP	RPL	PJ	WPJ	Daltu	Dalnls	KT	AT	Jumlah	PJ	WPJ	Daltu	Dalnls	KT										AT	Jumlah						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)									
1	Semua Irbn	Asistensi dan Penilaian Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Nawa Adyasta)	Evaluasi	Menilai ketaatan dan kepatuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Seluruh OPD	Januari M1	Desember M4	1	1	1	1	1	1	3	1	2	2	3	5	5	37	74	74	111	185	555	1036	0.00	37	ATK,Laptop	Sedang	Pengawasan	Wilayah Binaan	Wilayah Binaan	Wilayah Binaan	Wilayah Binaan
2	Irbn I	Monitoring LHKAN	Monitoring	Ketaatan dan kepatuhan penyampaian LHKPN	Seluruh ASN	Januari M1	April M4	1	1	1	1	1	3	1	2	2	3	5	5	1	2	2	3	5	15	28	0.00	1	ATK,Laptop	Sedang	Mandatory	Wajib LHKPN				
3	Irbn II	Reviu DAU yang ditentukan penggunaannya TA 2024	Reviu	Ketaatan dan kepatuhan atas penggunaan DAU yang ditentukan penggunaannya	Seluruh OPD Penerima DAU yang ditentukan penggunaannya	Januari M1	Januari M4	1	1	1	1	1	3	1	2	2	3	5	5	1	2	2	3	5	15	28	0.00	1	ATK,Laptop	Sedang	Mandatory		Bidang Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum,			
4	Irbn II	Reviu Sisa DAU yang ditentukan penggunaannya TA 2023	Reviu	Ketaatan dan kepatuhan atas penggunaan DAU yang ditentukan penggunaannya	Seluruh OPD Penerima DAU yang ditentukan penggunaannya	Januari M1	Januari M4	1	1	1	1	1	3	1	2	2	3	5	5	1	2	2	3	5	15	28	0.00	1	ATK,Laptop	Sedang	Mandatory		Bidang Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum,			
5	Irbn III	Evaluasi Risk Register OPD	Evaluasi	Ketaatan dan Kepatuhan penyusunan Risk Register PD	Seluruh OPD	Januari M1	Januari M2	1	1	1	1	1	3	1	2	2	3	5	5	1	2	2	3	5	15	28	0.00	1	ATK,Laptop	Tinggi	Mandatory			Seluruh OPD		
6	Irbn III	Penyusunan PPBR PKPT 2024	Pengawasan Lainnya	Ketaatan dan Kepatuhan Penyusunan Program Kerja berbasis Resiko	Seluruh OPD	Januari M1	Januari M2	1	1	1	1	1	3	1	2	2	3	5	5	1	2	2	3	5	15	28	0.00	1	ATK,Laptop	Tinggi	Mandatory			Seluruh OPD		
7	Irbn I, II, III	Reviu DAK Tahap III Tahun 2023	Reviu	Ketaatan dan kepatuhan atas realisasi fisik dan keuangan dana DAK	Seluruh OPD Penerima DAK	Januari M1	April M1	1	1	1	1	1	3	1	2	2	3	5	5	3	6	6	9	15	45	84	0.00	3	ATK,Laptop	Sedang	Mandatory	Wilayah Binaan	Wilayah Binaan	Wilayah Binaan		
8	Irbn IV	Pengawasan dan Monitoring SP4LAPOR	Monitoring	Menilai ketaatan dan kepatuhan atas SP4LAPOR	OPD terkait	Januari M1	Desember M4	1	1	1	1	1	3	1	2	2	3	5	5	12	24	24	36	60	180	336	0.00	12	ATK,Laptop	Tinggi	MCP				Seluruh OPD	
9	Irbn IV	Monitoring dan Tindak Lanjut WBS Kabupaten	Monitoring	Menilai ketaatan dan kepatuhan atas WBS Kabupaten	Seluruh OPD	Januari M1	Desember M4	1	1	1	1	1	3	1	2	2	3	5	5	2	4	4	6	10	30	56	0.00	2	ATK,Laptop	Sedang	MCP				Seluruh OPD	
10	Irbn IV	Monitoring dan Tindak Lanjut Pemeriksaan Internal	Monitoring	Menilai ketaatan dan kepatuhan penyelesaian tindak lanjut	Seluruh OPD	Januari M1	Desember M4	1	1	1	1	1	3	1	2	2	3	5	5	2	4	4	6	10	30	56	0.00	2	ATK,Laptop	Sedang	MCP				Seluruh OPD	
11	Irbn IV	Monitoring dan Tindak Lanjut Pemeriksaan Eksternal	Monitoring	Menilai ketaatan dan kepatuhan penyelesaian tindak lanjut	Seluruh OPD	Januari M1	Desember M4	1	1	1	1	1	3	1	2	2	3	5	5	2	4	4	6	10	30	56	0.00	2	ATK,Laptop	Sedang	MCP				Seluruh OPD	
12	Irbn IV	Monitoring dan Tindak Lanjut WBS PBJ	Monitoring	Menilai ketaatan dan kepatuhan atas WBS PBJ	Seluruh OPD	Januari M1	Desember M4	1	1	1	1	1	3	1	2	2	3	5	5	2	4	4	6	10	30	56	0.00	2	ATK,Laptop	Sedang	MCP				Seluruh OPD	
13	Irbn IV	Penilaian Mandiri MPAK (FCP)	Evaluasi	Menilai IEPK	Seluruh OPD	Januari M1	Desember M4	1	1	1	1	1	3	1	2	2	3	5	5	2	4	4	6	10	30	56	0.00	2	ATK,Laptop	Tinggi	MCP				Seluruh OPD	
14	Irbn IV	Audit Investigasi/PKKN (Perhitungan Kerugian Keuangan Negara)	Audit	Audit Investigasi Dugaan TPK / Menghitung kerugian keuangan negara	OPD yang berkasus	Januari M1	Desember M4	1	1	1	1	1	3	1	3	5	10	20	20	3	9	15	30	60	180	297	0.00	3	ATK,Laptop	Tinggi	Pengawasan		BUMDes Jehem	Sesuai Pengaduan		
15	Irbn IV	Monitoring dan Evaluasi SPI	Monev	Menilai ketaatan dan kepatuhan atas SPI	Seluruh OPD dan stakeholder	Januari M1	Desember M4	1	1	1	1	1	3	1	2	2	3	5	5	1	2	2	3	5	15	28	0.00	1	ATK,Laptop	Sedang	Pengawasan		BUMDes Jehem	Sesuai Pengaduan		
16	Semua Irbn	Probit Audit	Probit Audit	Menilai ketaatan dan kepatuhan pelaksanaan pengaduan	OPD binaan terpilih	Januari M1	Desember M4	1	1	1	1	1	3	1	2	2	4	10	10	5	10	10	20	50	150	245	0.00	5	ATK,Laptop	Tinggi	Pengawasan	Wilayah Binaan	Wilayah Binaan	Wilayah Binaan	Wilayah Binaan	
17	Irbn I, II, dan III	Reviu LPPD	Reviu	Ketaatan dan kepatuhan atas standar penyusunan LPPD	Seluruh OPD	Januari M1	Marret M3	1	1	1	1	1	3	1	2	2	3	5	5	1	2	2	3	5	15	28	0.00	1	ATK,Laptop	Sedang	Mandatory	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah		

No	Irbn Pengampu	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		Jumlah (Orang)						Jumlah HP perorangan						HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan	Irbn 1	Irbn 2	Irbn 3	Irbn 4			
						RMP	RPL	PJ	WPJ	Daltu	Dalnls	KT	AT	Jumlah	PJ	WPJ	Daltu	Dalnls	KT	AT	Jumlah	PJ	WPJ	Daltu	Dalnls										KT	AT	Jumlah
						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)																				
18	Semua Irbn	Consulting	Pengawasan Lainnya	Asistensi dan konsultasi atas tata kelola dan pengendalian organisasi	Seluruh OPD	Januari M1	Desember M4	1	1	1	1	1	3												0.00	4	ATK,Laptop	Sedang	Mandatory	Wilayah Binaan	Wilayah Binaan	Wilayah Binaan	Wilayah Binaan				
19	Irbn III	Reviu BOS SD Reviu BOS SMP	Reviu	Ketaatan dan Kepatuhan terhadap Pengelolaan Dana BOS	Didikpora	Februari M1	Februari M2	1	1	1	1	1	3	1	2	2	3	5	5	2	4	4	6	10	30	56	0.00	2	ATK,Laptop	Sedang	Mandatory			Didikpora			
20	Irbn I dan III	Audit Pengelolaan Keuangan Desa	Audit	Ketaatan dan Kepatuhan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa	Desa binaan terpilih	Februari M1	Februari M4	1	1	1	1	1	3	1	2	2	4	10	10	2	4	4	8	20	60	98	0.00	2	ATK,Laptop	Tinggi	Mandatory	Desa Mengani		Desa Bantang			
21	Irbn I, II, dan III	Reviu LKPD	Reviu	Ketaatan dan kepatuhan LKPD sesuai SAP	Seluruh OPD	Februari M1	Februari M4	1	1	1	1	1	3	1	2	2	3	5	5	1	2	2	3	5	15	28	0.00	1	ATK,Laptop	Tinggi	Mandatory	BKPAD	BKPAD	BKPAD			
22	Irbn II	Reviu LKJIP	Reviu	Ketaatan dan kepatuhan penyusunan LKJIP	Pemda	Februari M3	Februari M4	1	1	1	1	1	3	1	2	2	3	5	5	1	2	2	3	5	15	28	0.00	1	ATK,Laptop	Sedang	Mandatory		Pemda				
23	Irbn II	Reviu SHS	Reviu	Ketaatan dan Kepatuhan terhadap SHS	BKPAD	Maret M1	Maret M4	1	1	1	1	1	3	1	2	2	3	5	5	2	4	4	6	10	30	56	0.00	2	ATK,Laptop	Sedang	MCP		BKPAD				
24	Irbn II	Reviu Sisa DAK Fisik TA 2023	Reviu	Ketaatan dan kepatuhan atas realisasi fisik dan keuangan dana DAK	Seluruh OPD Penerima DAK	Maret M3	Maret M3	1	1	1	1	1	3	1	2	2	3	5	5	1	2	2	3	5	15	28	0.00	1	ATK,Laptop	Sedang	Mandatory		BKPAD				
25	Irbn II	Reviu Sisa DAK Nonfisik TA 2023	Reviu	Ketaatan dan kepatuhan atas realisasi fisik dan keuangan dana DAK	Seluruh OPD Penerima DAK	Maret M3	Maret M3	1	1	1	1	1	3	1	2	2	3	5	5	1	2	2	3	5	15	28	0.00	1	ATK,Laptop	Sedang	Mandatory		BKPAD				
26	Irbn III	Monitoring dan Evaluasi Kapabilitas APJP	Monev	Peningkatan Kapabilitas APJP	Inspektorat	Maret M1	Maret M4	1	1	1	1	1	3	1	2	2	3	5	5	1	2	2	3	5	15	28	0.00	1	ATK,Laptop	Sedang	Mandatory			Inspektorat			
27	Irbn III	Reviu Penyerapan Anggaran,PBJ dan Penggunaan Dana Desa	Reviu	Ketaatan dan kepatuhan atas penyerapan anggaran dan PBJ	BKPAD dan Bagian PBJ	Maret M1	Maret M4	1	1	1	1	1	3	1	2	2	3	5	5	1	2	2	3	5	15	28	0.00	1	ATK,Laptop	Sedang	Permintaan Rutin BPKP		BKPAD, Bagian PBJ				
28	Irbn III	Reviu Manajemen ASN	Reviu	Ketaatan dan kepatuhan pelaksanaan manajemen ASN	BKPSDM	Maret M1	Maret M4	1	1	1	1	1	3	1	2	2	3	5	5	1	2	2	3	5	15	28	0.00	1	ATK,Laptop	Sedang	MCP		BKPSDM				
29	Irbn I	Audit Ketaatan	Audit	Ketaatan dan kepatuhan atas pelaksanaan program/kegiatan	Wilayah Binaan	April M1	April M4	1	1	1	1	1	3	1	2	2	4	10	10	1	2	2	4	10	30	49	0.00	1	ATK,Laptop	Tinggi	Mandatory	Dinas Koperasi,UMK M dan Tenaga Kerja					
30	Irbn I, II, dan III	Evaluasi LKJIP	Evaluasi	Ketaatan dan kepatuhan penyusunan LKJIP	Seluruh OPD	April M2	April M4	1	1	1	1	1	3	1	2	2	3	5	5	37	74	74	111	185	555	1036	0.00	37	ATK,Laptop	Sedang	Mandatory	Wilayah Binaan	Wilayah Binaan	Wilayah Binaan			
31	Irbn II	Reviu ASB 2025	Reviu	Ketaatan dan Kepatuhan terhadap ASB	BKPAD	April M1	April M4	1	1	1	1	1	3	1	2	2	3	5	5	2	4	4	6	10	30	56	0.00	2	ATK,Laptop	Sedang	MCP		BKPAD				
32	Irbn II	Audit Hibah/Bansos	Audit	Ketaatan dan Kepatuhan terhadap pengelolaan Hibah/Bansos	Wilayah Binaan	April M1	April M4	1	1	1	1	1	3	1	2	2	3	5	5	2	4	4	6	10	30	56	0.00	2	ATK,Laptop	Sedang	MCP		Bagian Kesra				
32	Irbn III	Reviu Kode Etik	Reviu	Ketaatan dan kepatuhan penyusunan Kode Etik	BKPSDM	April M1	April M4	1	1	1	1	1	3	1	2	2	3	5	5	1	2	2	3	5	15	28	0.00	1	ATK,Laptop	Sedang	IEPK		BKPSDM				
33	Irbn IV	Sosialisasi Anti Korupsi/FCP Lainnya	Pengawasan Lainnya	Peningkatan Pemahaman dan Pencegahan Korupsi	Masyarakat	April M1	Juni M4	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	8	0.00	1	ATK,Laptop	Sedang	Mandatory				Masyarakat		
34	Irbn IV	Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik	Monev	Memantau pelaksanaan pelayanan publik	Seluruh OPD	April M1	Juni M4	1	1	1	1	1	3	1	2	2	3	5	5	1	2	2	3	5	15	28	0.00	1	ATK,Laptop	Sedang	Mandatory				Seluruh OPD		
35	Irbn I, II, III	Reviu DAK Tahap I 2024	Reviu	Ketaatan dan kepatuhan atas realisasi fisik dan keuangan dana DAK	Seluruh OPD Penerima DAK	April M1	Juni M4	1	1	1	1	1	3	1	2	2	3	5	5	3	6	6	9	15	45	84	0.00	3	ATK,Laptop	Sedang	Mandatory	Wilayah Binaan	Wilayah Binaan	Wilayah Binaan			
36	Irbn II	Reviu rancangan KUA/PPAS Induk 2025	Reviu	Ketaatan dan kepatuhan atas penyusunan KUA/PPAS 2025	Bappeda, BKPAD	Mei M1	Mei M4	1	1	1	1	1	3	1	2	2	3	5	5	1	2	2	3	5	15	28	0.00	1	ATK,Laptop	Sedang	Mandatory		Bappeda, BKPAD				
37	Irbn II	Reviu RKPD Induk 2025	Reviu	Ketaatan dan Kepatuhan atas penyusunan RKPD tahun 2025	Bappeda	Mei M2	Mei M4	1	1	1	1	1	3	1	2	2	3	5	5	1	2	2	3	5	15	28	0.00	1	ATK,Laptop	Sedang	Mandatory		Bappeda				

No	Irbn Pengampu	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		Jumlah (Orang)						Jumlah HP perorangan						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan	Irbn 1	Irbn 2	Irbn 3	Irbn 4							
						RMP	RPL	PJ	WPJ	Daltu	Dalnls	KT	AT	Jumlah	PJ	WPJ	Daltu	Dalnls	KT										AT	Jumlah					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)								
38	Irbn II	Reviu RPJPD	Reviu	Ketaatan dan Kepatuhan atas penyusunan RPJPD	Bappeda	Mei M3	Mei M4	1	1	1	1	1	3	1	2	2	3	5	5	1	2	2	3	5	15	28	0.00	1	ATK,Laptop	Sedang	Mandatory	Bappeda			
39	Irbn I & III	Audit Kinerja	Audit	Menilai ekonomis, efisien, efektif (3E) dan Kepatuhan pelaksanaan program/kegiatan	Wilayah Binaan	Mei M1	Mei M4	1	1	1	1	1	3	1	2	2	4	10	10	1	2	2	4	10	30	49	0.00	1	ATK,Laptop	Tinggi	Mandatory	Dinas Kesehatan		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
40	Irbn I	Monitoring dan Evaluasi PMPRB	Monev	Ketaatan dan Kepatuhan atas PMPRB	Seluruh OPD	Mei M3	Juni M3	1	1	1	1	1	3	1	2	2	3	5	5	1	2	2	3	5	15	28	0.00	1	ATK,Laptop	Sedang	Mandatory	Seluruh OPD			
41	Irbn I	Audit Perjalanan Dinas	Audit	Ketaatan dan kepatuhan atas penyelenggaraan belanja perjalanan dinas	Setwan dan Dinkes	Juni M1	Juni M4	1	1	1	1	1	3	1	2	2	4	10	10	1	2	2	4	10	30	49	0.00	1	ATK,Laptop	Sedang	MCP	Setwan dan Dinkes			
42	Irbn I	Pembinaan ZI	Pengawasan Lainnya	Ketaatan dan kepatuhan atas tingkat integritas Pemda	OPD bidang Pelayanan Publik	Juni M1	Juni M4	1	1	1	1	1	3	1	2	2	3	5	5	1	2	2	3	5	15	28	0.00	1	ATK,Laptop	Sedang	Mandatory	OPD Bidang Pelayanan Publik			
42	Irbn II	Audit Kinerja	Audit	Menilai ekonomis, efisien, efektif (3E) dan Kepatuhan pelaksanaan program/kegiatan	Wilayah Binaan	Juni M1	Juni M4	1	1	1	1	1	3	1	2	2	4	10	10	1	2	2	4	10	30	49	0.00	1	ATK,Laptop	Tinggi	Mandatory		Dinas Dukcapil		
43	Irbn III	Reviu Penyerapan Anggaran PBJ dan Penggunaan Dana Desa	Reviu	Ketaatan dan kepatuhan atas penyerapan Anggaran, PBJ dan Penggunaan Dana Desa	BKPAD, Bagian PBJ	Juni M1	Juni M4	1	1	1	1	1	3	1	2	2	3	5	5	1	2	2	3	5	15	28	0.00	1	ATK,Laptop	Sedang	Permintaan BPKP		BKPAD, Bagian PBJ		
44	Irbn III	Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP	Evaluasi	Peningkatan Kapabilitas APIP	Inspektoral	Juni M1	Juni M4	1	1	1	1	1	3	1	2	2	3	5	5	1	2	2	3	5	15	28	0.00	1	ATK,Laptop	Tinggi	Mandatory		Inspektoral		
45	Irbn III	Penilaian Mandiri Maturlas SPIP	Evaluasi	Peningkatan Kematangan Penerapan SPIP	Seluruh OPD	Juni M1	Agustus M4	1	1	1	1	1	3	1	2	2	4	10	10	1	2	2	4	10	30	49	0.00	1	ATK,Laptop	Tinggi	Mandatory		Seluruh OPD		
48	Irbn II	Reviu RKPD Perubahan 2024	Reviu	Ketaatan dan kepatuhan penyusunan P-RKPD 2024	BAPPEDA	Juni M3	Juni M4	1	1	1	1	1	3	1	2	2	3	5	5	1	2	2	3	5	15	28	0.00	1	ATK,Laptop	Sedang	Mandatory		Bappeda		
46	Irbn I	Monev Saber Pungli	Monev	Memantau pelaksanaan Saber Pungli	Seluruh OPD /Satgas	Juli M1	Juli M4	1	1	1	1	1	3	1	2	2	3	5	5	1	2	2	3	5	15	28	0.00	1	ATK,Laptop	Sedang	Mandatory	Satgas			
47	Irbn IV	Reviu Benturan Kepentingan	Reviu	Penegakan integritas ASN	BKPSDM	Juli M1	Desember M4	1	1	1	1	1	3	1	2	2	3	5	5	1	2	2	3	5	15	28	0.00	1	ATK,Laptop	Tinggi	Mandatory		BKPSDM		
46	Irbn II	Audit Honorarium OPD	Audit	Ketaatan dan kepatuhan atas pengelolaan Honorarium	Wilayah Binaan	Juli M2	Juli M4	1	1	1	1	1	3	1	2	2	3	5	5	1	2	2	3	5	15	28	0.00	1	ATK,Laptop	Tinggi	MCP		Wilayah Binaan		
49	Irbn II dan III	Audit BKK OPD	Audit	Ketaatan dan kepatuhan atas pengelolaan BKK	Wilayah Binaan	Juli M1	Juli M4	1	1	1	1	1	3	1	2	2	3	5	5	1	2	2	3	5	15	28	0.00	1	ATK,Laptop	Tinggi	MCP		Wilayah Binaan	Wilayah Binaan	
49	Irbn II	Reviu KUA/PPAS Perubahan 2024	Reviu	Ketaatan dan kepatuhan atas KUA/PPAS perubahan 2024	BKPAD, BAPPEDA	Juli M4	Juli M4	1	1	1	1	1	3	1	2	2	3	5	5	1	2	2	3	5	15	28	0.00	1	ATK,Laptop	Sedang	Mandatory		Bappeda, BKPAD		
50	Irbn II	Reviu Rancangan Akhir Renja 2025	Reviu	Ketaatan dan kepatuhan atas penyusunan rancangan akhir Renja 2025	BAPPEDA	Juli M4	Juli M4	1	1	1	1	1	3	1	2	2	3	5	5	1	2	2	3	5	15	28	0.00	1	ATK,Laptop	Sedang	Mandatory		Bappeda		
51	Irbn III	Audit Ketaatan	Audit	Ketaatan dan kepatuhan atas pelaksanaan program/kegiatan	Wilayah Binaan	Juli M1	Juli M4	1	1	1	1	1	3	1	2	2	4	10	10	1	2	2	4	10	30	49	0.00	1	ATK,Laptop	Tinggi	Mandatory			Disperindag	
52	Irbn I	Evaluasi capaian MCP Korsupgah	Evaluasi	Mengetahui capaian MCP dan melakukan tindak lanjut/improvement	OPD terkait	Juli M1	Juli M4	1	1	1	1	1	3	1	2	2	3	5	5	1	2	2	3	5	15	28	0.00	1	ATK,Laptop	Tinggi	MCP	8 area intervensi			
53	Irbn I	Pengawasan P3DN Lainnya	Pengawasan Lainnya	Ketaatan dan kepatuhan penggunaan P3DN	Bagian PBJ	Juli M1	Juli M4	1	1	1	1	1	3	1	2	2	3	5	5	1	2	2	3	5	15	28	0.00	1	ATK,Laptop	Sedang	Mandatory	Bagian PBJ			
54	Irbn I	Audit Pengelolaan Keuangan Desa	Audit	Ketaatan dan Kepatuhan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa	Desa binaan terpilih	Agustus M1	Agustus M4	1	1	1	1	1	3	1	2	2	4	10	10	1	2	2	4	10	30	49	0.00	1	ATK,Laptop	Tinggi	Mandatory	Desa Tiga			
55	Irbn III	Audit Ketaatan	Audit	Ketaatan dan kepatuhan atas pelaksanaan program/kegiatan	Wilayah Binaan	Agustus M1	Agustus M4	1	1	1	1	1	3	1	2	2	4	10	10	1	2	2	4	10	30	49	0.00	1	ATK,Laptop	Tinggi	Mandatory			Dinas Sosial	

No	Irbn Pengampu	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		Jumlah (Orang)						Jumlah HP perorangan						HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan	Irbn 1	Irbn 2	Irbn 3	Irbn 4				
						RMP	RPL	PJ	WPJ	Daltu	Dalnls	KT	AT	Jumlah	PJ	WPJ	Daltu	Dalnls	KT	AT	PJ	WPJ	Daltu	Dalnls	KT										AT	Jumlah		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)																								(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)			
56	Irbn II	Reviu Renja OPD	Reviu	Ketaatan dan kepatuhan atas penyusunan Renja	Seluruh OPD	Agustus M2	Agustus M4	1	1	1	1	1	3	1	2	2	3	5	5	1	2	2	3	5	15	28	0.00	1	ATK,Laptop	Sedang	Pengawasan		Seluruh OPD					
	Irbn IV	PDIT Hibah	PDIT	Ketaatan dan kepatuhan atas pengelolaan Hibah	OPD Pengelola Hibah	Agustus M1	Agustus M4	1	1	1	1	1	3	1	2	2	3	5	5	1	2	2	3	5	15	28	0.00	1	ATK,Laptop	Tinggi	MCP				OPD Pengelola Hibah			
57	Irbn I, II, III	Reviu RKA Induk 2025	Reviu	Ketaatan dan kepatuhan atas penyusunan RKA	Seluruh OPD	Agustus M2	September M4	1	1	1	1	1	3	1	2	2	3	5	5	1	2	2	3	5	15	28	0.00	1	ATK,Laptop	Sedang	Pengawasan	Wilayah Binaan	Wilayah Binaan	Wilayah Binaan	Wilayah Binaan			
58	Irbn III	Reviu Penyerapan Anggaran PBJ dan Penggunaan Dana Desa	Reviu	Ketaatan dan kepatuhan atas penyerapan anggaran, PBJ dan Dana Desa	BKPAD, Bagian PBJ	September M1	September M3	1	1	1	1	1	3	1	2	2	3	5	5	1	2	2	3	5	15	28	0.00	1	ATK,Laptop	Sedang	Mandatory			BKPAD, Bagian PBJ				
	Irbn II	Audit Kinerja	Audit	Menilaian ekonomis, efisien, efektif (3E) dan Kepatuhan pelaksanaan program/kegiatan	Wilayah Binaan	September M1	September M4	1	1	1	1	1	3	1	2	2	4	10	10	1	2	2	4	10	30	49	0.00	1	ATK,Laptop	Tinggi	MCP		Dinas PTSP					
59	Irbn III	Monitoring dan Evaluasi Kapabilitas APIP	Monev	Peningkatan Kapabilitas APIP	Inspektorat	September M1	September M4	1	1	1	1	1	3	1	2	2	3	5	5	1	2	2	3	5	15	28	0.00	1	ATK,Laptop	Sedang	Mandatory			Inspektorat				
60	Irbn I, II, dan III	Reviu RKA Perubahan 2024	Reviu	Ketaatan dan kepatuhan atas penyusunan RKA	Semua OPD	September M1	September M4	1	1	1	1	1	3	1	2	2	3	5	5	1	2	2	3	5	15	28	0.00	1	ATK,Laptop	Sedang	Mandatory	Wilayah Binaan	Wilayah Binaan	Wilayah Binaan				
61	Irbn I	Pengawasan BOK POM	Pengawasan	Ketaatan dan kepatuhan atas pengelolaan BOK POM	Dinas Kesehatan	September M1	September M4	1	1	1	1	1	3	1	2	2	4	10	10	1	2	2	4	10	30	49	0.00	1	ATK,Laptop	Sedang	Dinas Kesehatan							
62	Irbn IV	PDIT Bansos	PDIT	Ketaatan dan kepatuhan atas pengelolaan Bansos	OPD Pengelola Bansos	September M1	September M1	1	1	1	1	1	3	1	2	2	3	5	5	1	2	2	3	5	15	28	0.00	1	ATK,Laptop	Tinggi	MCP				OPD Pengelola Bansos			
63	Irbn I, II dan III	Reviu DAK Fisik	Reviu	Ketaatan dan kepatuhan atas Pengelolaan DAK Fisik	Seluruh OPD Penerima DAK	Oktober M1	Oktober M4	1	1	1	1	1	3	1	2	2	3	5	5	3	6	6	9	15	45	84	0.00	3	ATK,Laptop	Sedang	Mandatory	Wilayah Binaan	Wilayah Binaan	Wilayah Binaan				
64	Irbn I dan III	Audit Honorarium	Audit	Ketaatan dan kepatuhan atas Pengelolaan Honorarium	Wilayah Binaan	Oktober M1	Oktober M4	1	1	1	1	1	3	1	2	2	4	10	10	1	2	2	4	10	30	49	0.00	1	ATK,Laptop	Tinggi	MCP	Dinkes		Sekretariat Daerah				
65	Irbn II	Reviu Pajak Daerah	Reviu	Ketaatan dan kepatuhan atas pengelolaan pajak daerah	BKPAD	Oktober M2	Oktober M4	1	1	1	1	1	3	1	2	2	3	5	5	1	2	2	3	5	15	28	0.00	1	ATK,Laptop	Sedang	Mandatory		BKPAD					
66	Irbn II	Reviu Tata Kelola Perijinan	Reviu	Ketaatan dan kepatuhan atas pengelolaan perijinan	Dinas PTSP	Oktober M3	Oktober M4	1	1	1	1	1	3	1	2	2	3	5	5	1	2	2	3	5	15	28	0.00	1	ATK,Laptop	Sedang	MCP		Dinas PTSP					
67	Irbn IV	PDIT PAD	PDIT	Ketaatan dan kepatuhan atas pengelolaan PAD	OPD Pengelola Bansos	Oktober M1	Oktober M4	1	1	1	1	1	3	1	2	2	3	5	5	1	2	2	3	5	15	28	0.00	1	ATK,Laptop	Tinggi	MCP				OPD Pengelola PAD			
68	Irbn II	Reviu Tata Kelola Dukcapil	Reviu	Ketaatan dan kepatuhan atas pengelolaan perijinan	Dinas Dukcapil	November M2	November M4	1	1	1	1	1	3	1	2	2	3	5	5	1	2	2	3	5	15	28	0.00	1	ATK,Laptop	Sedang	MCP		Dinas Dukcapil					
69	Irbn III	Audit Perjalanan Dinas	Audit	Ketaatan dan Kepatuhan Pengelolaan Belanja Perjalanan Dinas	Wilayah Binaan	November M1	November M4	1	1	1	1	1	3	1	2	2	5	10	10	1	2	2	5	10	30	50	0.00	1	ATK,Laptop	Sedang	MCP			Sekretariat Daerah				
70	Irbn I, II dan III	Reviu DAK Fisik	Reviu	Ketaatan dan kepatuhan atas Pengelolaan DAK Fisik	Seluruh OPD Penerima DAK	November M1	November M4	1	1	1	1	1	3	1	2	2	3	5	5	3	6	6	9	15	45	84	0.00	3	ATK,Laptop	Tinggi	Mandatory	Wilayah Binaan	Wilayah Binaan	Wilayah Binaan				
71	Irbn I	Evaluasi capaian MCP Korsupgah	Evaluasi	Mengalauhi capaian MCP dan melakukan tindak lanjut/improvement	OPD terkait	Desember M1	Desember M4	1	1	1	1	1	3	1	2	2	3	5	5	1	2	2	3	5	15	28	0.00	1	ATK,Laptop	Tinggi	MCP	8 area intervensi						
72	Irbn I	Monev Saber Pungli	Monev	Memantau pelaksanaan Saber Pungli	Seluruh OPD /Satgas	Desember M1	Desember M4	1	1	1	1	1	3	1	2	2	3	5	5	1	2	2	3	5	15	28	0.00	1	ATK,Laptop	Sedang	Mandatory	Salgas						
73	Irbn I	Pengawasan P3DN	Pengawasan Lainnya	Ketaatan dan kepatuhan penggunaan P3DN	Bagian PBJ	Desember M1	Desember M4	1	1	1	1	1	3	1	2	2	3	5	5	1	2	2	3	5	15	28	0.00	1	ATK,Laptop	Sedang	Mandatory	Bagian PBJ						
74	Irbn I	Pembinaan ZI	Pengawasan Lainnya	Ketaatan dan kepatuhan atas tingkat integritas Pemda	OPD bidang Pelayanan Publik	Desember M1	Desember M4	1	1	1	1	1	3	1	2	2	3	5	5	1	2	2	3	5	15	28	0.00	1	ATK,Laptop	Sedang	Mandatory	OPD Bidang Pelayanan Publik						

